Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
DOI:10.25077/jakp | Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id |

KRITIK EKOLOGIS : EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM KOLAM KONSERVASI DI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI CIKAPUNDUNG

Camila[1], Edy Syahputra Sihombing[2]
[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia
[2]Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

[*] camilanaidu244@gmail.com

Dikirim : 12/10/2022
Diterima : 23/12/2022
Terbit : 25/04/2023

Abstract

Preservation of the environment with the concept of conservation is one part of the science of ecology. Land use in the riparian area or watershed area is one of the conservation areas needed to fulfill the environmental sustainability of water areas. The purpose of this study was to evaluate the conservation pond program carried out in the Cikapundung watershed, Kampoeng Tjibarani. By collecting data through observation, interviews, and studies of policy literature governing the management and development of project development in watersheds. Based on data collection and analysis of policy evaluation that has been carried out, it was found that there were several factors for the failure of this program (1) non-functional land use, (2) unsustainable program and management (3) did not meet the standards and criteria for development policies on regional land River flow . With restoration using the ecopark concept, conservation ponds can be a new breakthrough for management and development of watershed land in accordance with land functional and standards and criteria for management and development of watershed land.

Keywords: Watershed; Preservation Of The Environment; Ecopark

PENDAHULUAN

Perkara ekologis dan kerusakan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari pola kehidupan manusia dalam aspek ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan (Sihombing, 2019). Jaminan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dapat tercapai jika aktivitas - aktivitas sekitarnya mendukung dan menerapkan prinsip pelestarian sesuai dengan kebutuhan lahan hijau tersebut. Prinsip pelestarian lingkungan termasuk salah bagian dari ilmu ekologi yang memiliki makna hubungan antar manusia dan alam, kultural, serta keindahan hingga nilai sosial. Penerapan prinsip pelestarian lingkungan sering menggunakan konsep konservasi, salah satu bentuk konservasi dilakukan di daerah sempadan sungai, atau

dikenal dengan daerah aliran sungai (DAS) (Karno & Mubarrak, 2018). Konservasi yang dilakukan di DAS didasarkan pada hubungan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, di samping itu untuk terwujudnya kelestarian lingkungan serta menjamin eksistensi ekologis tetap ada (Fuady & Azizah, 2008). Pemerintah berusaha semaksimal mungkin berkontribusi untuk melakukan pelestarian lingkungan, salah satunya dengan membuat program - program konservasi di kawasan konservasi air. Pada umumnya kolam konservasi diisi dengan keanekaragaman hayati ataupun ruang lingkungan hijau yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan. Beda halnya dengan program konservasi yang dibangun di lokasi sempadan Sungai Cikapundung, segmen Rancabentang I, Kampoeng Tjibarani yang merupakan salah satu anak sungai dari Sungai Citarum yang memiliki pelestarian lingkungannya dengan membuat kolam konservasi juga (Cahyana, 2018). Di lokasi tersebut dibangun program pelestarian berbentuk kolam konservasi serupa. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji keberhasilan dari program tersebut, dengan objek yang sebelumnya belum pernah diteliti dan konsep terbaru dari sisi ekologis tidak hanya kritik dari kebijakan saja. Konservasi yang dimaksud disini berbentuk kolam - kolam yang dibangun di DAS Sungai Cikapundung yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung dalam rangka perwujudan kebijakan pemerintah yakni, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Pengertian DAS di dalam kebijakan ini dimaksud sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak - anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Pemulihan berbasis konservasi di Kampoeng Tjibarani ini memenuhi standar daya dukung DAS yang dapat dipulihkan yakni adanya ruang wilayah yang tidak berfungsi semestinya dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air. (Pemerintah Republik Indonesia, 2012)

Konservasi yang dilakukan oleh DPU Kota Bandung di DAS Kampoeng Tjibarani memenuhi standar pengelolaan dan pelestarian DAS sesuai kebijakan yang berlaku dengan memanfaatkan lahan, menjadikannya sebagai kolam - kolam konservasi yang memiliki fungsi nya masing - masing. Pembuatan dan pengelolaan program konservasi kolam ini melibatkan komunitas setempat, Serlok Bantaran. Proses pembuatan nya sendiri memakan waktu sekitar satu bulan, terhitung dari bulan Desember 2019 hingga Januari 2020. Aktivitas kolam - kolam tersebut berlangsung sekitar tiga bulan sejak Januari 2020 sesuai dengan fungsinya masing - masing. Sebelum adanya penurunan produktivitas kolam, keempat kolam tersebut

memiliki fungsi diantaranya; kolam pertama yang berfungsi sebagai penampung mata air. Kolam kedua dan ketiga memiliki fungsi sebagai konservasi ikan endemik Sungai Cikapundung yakni Osteochilus vittatus atau dikenal di masyarakat sebagai ikan Nilem. Terakhir, kolam keempat yang memiliki fungsi sebagai budidaya aquaponik urban farming.

Dalam situasi pengelolaannya kemunculan pandemi Covid - 19 mengakibatkan kolam - kolam konservasi ini mengalami penurunan produktivitas hingga peralihan fungsi kolam. Namun, terlepas dari pandemi Covid -19, terdapat beberapa faktor lain yang membuat pengelolaan kolam mengalami penurunan produktivitas serta peralihan fungsi kolam, hal ini tidak seiring dengan fungsi awal pembuatan kolam konservasi. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program pembangunan dan pengelolaan keberlanjutan kolam konservasi berdasarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokus di kawasan sempadan Sungai Cikapundung, Kampoeng Tjibarani tepatnya di segmen Rancabentang I, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat pada kurun waktu Oktober 2022 - Desember 2022 dengan menggunakan analisis evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai pencapaian kinerja dari suatu implementasi program, evaluasi dibutuhkan sebagai tolak ukur apakah tindakan sesuai dengan yang apa yang ingin dilakukan atau belum (Nugroho, 2014). Untuk melakukan proses evaluasi dibutuhkan indikator pengukuran, dengan menggunakan model *management evaluation* yang dikemukakan oleh Karl Luwig. Model evaluasi ini terdiri dari tiga indikator yang menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, yaitu:

a. Masukan (*input*)

   Tujuan indikator ini untuk melakukan analisis kualitas dan kuantitas apa saja yang diperlukan untuk merancang sebuah program (Wirawan, 2011)

b. Proses (*process*)

   Indikator ini memfokuskan pada implementasi atau bagaimana pelaksanaan program di lapangan (Wirawan, 2011)

c. Keluaran (*outputs*)

   Indikator ini bertujuan untuk menilai hasil akhir dari program, baik berbentuk manfaat, dampak ataupun produk. (Wirawan, 2011)

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi lapangan dan wawancara bersama masyarakat Kampoeng Tjibarani selaku penerima manfaat pertama dari pembangunan kolam konservasi, wawancara dilakukan secara acak dengan total narasumber sebanyak tujuh orang. Serta pihak pemerintah, baik dari kelurahan Cidadap hingga pihak DPU Kota Bandung selaku pihak konseptor dan pembangun kolam konservasi tersebut. Selanjutnya analisis data penelitian ini akan menggunakan konsep deskripsi kualitatif yang akan memaparkan penemuan data di lapangan secara deskriptif yang dapat mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan evaluasi kebijakan hingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Kolam Konservasi berdasarkan *Management Evaluation*

a. Masukan (*Inputs*)

Program kolam konservasi yang terletak di Kampoeng Tjibarani yang merupakan salah satu desa di wilayah Rancabentang I Kecamatan Cidadap, Kota Bandung berdampingan langsung dengan DAS Cikapundung. Di daerah sempadan sungai Cikapundung Kampoeng Tjibarani ini terdapat lokasi seluas ± 2.000 m dan sepanjang ± 160 m. Daerah sempadan sungai ini dulunya adalah sawah - sawah kecil milik warga Kampoeng Tjibarani. Sebagai perwujudan pemerintah melaksanakan kebijakan pengelolaan DAS, pembuatan kolam konservasi merupakan sebuah kolaborasi antara instansi pemerintah, DPU Kota Bandung bersama komunitas masyarakat setempat, Serlok Bantaran berdasarkan *ongoing development* yang dikonsepkan bersama komunitas Serlok Bantaran. Kola - kolam tersebut dibangun pada Desember 2019 lalu dengan jumlah empat kolam dan penyelesaian pembangunan tepat pada Januari 2020 (Kampoeng Tjibarani, 2022). Dari pembangunannya sendiri, berdasarkan wawancara dengan beberapa warga Kampoeng Tjibarani dan pihak kelurahan, dikatakan bahwa terdapat satu kolam yang seharusnya tidak perlu dibangun atau dengan kata lain tidak direncanakan di dalam anggaran serta program kerja DPU Kota Bandung. Keempat kolam tersebut dialokasikan sesuai dengan fungsinya; kolam penampung mata air, terapi ikan atau konservasi ikan endemik, koleksi tanaman bambu, dan aquaponic urban farming.

b. Proses (*Process)*

Pelaksanaan program kolam konservasi ini dilaksanakan tanpa adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang menyebabkan program ini dijalankan tanpa adanya standar. Bahkan untuk rancangan kerja saja tidak terlampirkan adanya program ini. Dalam proses implementasi di lapangan bahkan terdapat beberapa kendala seperti

adanya pembuatan kolam tambahan yang seharusnya tidak ada, hanya karena adanya kendala untuk pengakutan proses alat berat. DPU Kota Bandung juga tidak merealisasikan program *on-going development* yang telah dirancang oleh komunitas setempat sesuai dengan fungsi kawasan sempadan sungai Cikapundung dan fungsi wisata budaya Kampoeng Tjibarani.

c. Keluaran (*Outputs*)

Di samping dari fungsi masing - masing kolam, yang terlihat di lapangan sangat jauh berbeda, penulis menemukan fakta berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga Kampoeng Tjibarani bahwa adanya konflik kepentingan sehingga program tidak berjalan sesuai dengan fungsi kolam, hal ini dapat terlihat dari kondisi kolam yang sekarang tidak beraktivitas lagi. Lalu, rencana konservasi kolam - kolam tersebut tidak sesuai dengan realita ketika kolam - kolam beroperasi atau dengan kata lain berbanding terbalik dengan fungsi pertama yang dijabarkan, kenyataannya warga Kampoeng Tjibarani ketika diwawancara menyatakan kolam hanya berlangsung selama 2 bulan terakhir sebagai tempat terapi ikan yang berujung menjadi kolam renang anak - anak saja. Dengan demikian sistem pengelolaan program belum berjalan dengan baik hingga terjadi peralihan fungsi yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan DAS.

Gambar 1.Kolam Penampung Mata Air



Sumber : Diolah oleh peneliti

Kolam kedua, yang berfungsi sebagai kolam konservasi ikan endemik Osteochilus vittatus atau ikan Nilem, hanya berlangsung selama dua bulan lamanya dari sejak penyelesaian pembuatan kolam pada Januari 2020, kolam tersebut terkuras habis baik air dan ikan yang ada di dalam kolam.

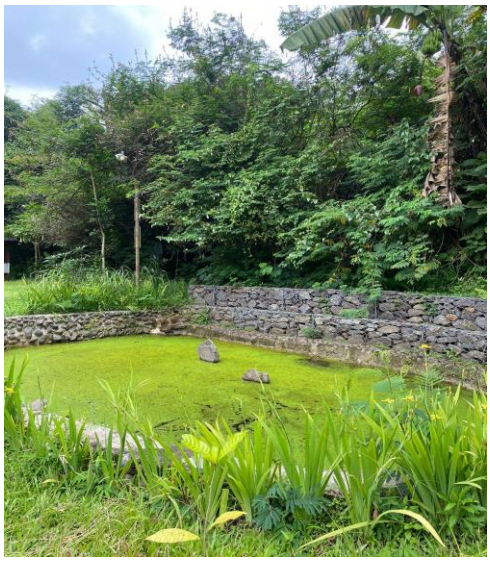
Gambar 2. Kolam Konservasi Ikan Endemik



Sumber : Diolah oleh peneliti

Kolam ketiga berfungsi sebagai budidaya aquaponik urban farming. Pembuatan awal kolam ini berdasarkan data wawancara dengan masyarakat Kampoeng Tjibarani dan pihak kelurahan dinyatakan bahwa tidak direncanakan, terlepas dari hal itu, kolam tersebut hingga kini hanya genangan air saja, dari awal pembuatan kolam hingga program berjalan belum ada kejelasan baik dari data wawancara maupun observasi tentang kegunaan kolam tersebut sebagai budidaya aquaponik urban farming yang seharusnya dilaksanakan.

Gambar 3. Kolam Aquaponic Urban Farming



Sumber : Diolah oleh peneliti

Penerapan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan DAS yang dilakukan oleh DPU Kota Bandung belum dapat dikatakan sesuai dengan harapan serta seharusnya pengelolaan DAS diberlakukan. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa argumen serta fakta baik dari proses pembangunan hingga pengelolaan kolam konservasi tersebut. Program konservasi ini belum mengandung makna dari konservasi itu sendiri. Konservasi secara luas merupakan upaya pelestarian agar penggunaan lebih efisien dan mengatur arah pengembagnan di masa datang termasuk kegiatan pemeliharaan (Purnaya, IGK ; Semara, IMT ; KR, Tunjungsari ; IN, 2019) Pembangunan dengan tujuan yang tidak paten dapat menyebabkan program tidak akan berjalan dengan seharusnya diharapkan. Tidak dapat dipungkiri terdapat faktor eksternal yang terjadi, seperti ada pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan pencurian bibit ikan endemik, terlepas dari hal ini ada permasalahan nyata lainnya yang menjadi faktor kendala kolam konservasi ini akhirnya hanya menjadi genangan air kotor saja.

Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang tidak dilibatkan dari awal pembangunan dapat mengakibatkan pengelolaan tidak berkelanjutan. SDM yang dimaksud yakni masyarakat Kampoeng Tjibarani dan komunitas Serlok Bataran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, masyarakat dan komunitas Serlok Bantaran memang adanya melakukan kolaborasi untuk pembangunan konservasi di daerah sempadan sungai ini. Namun, terjadi konflik kepentingan antara komunitas dan pihak DPU Kota Bandung saat pengkonsepan konservasi yang dimaksud oleh masyarakat dan komunitas tidak sejalan dengan DPU Kota Bandung. Konsep yang diinginkan oleh masyarakat dan komunitas sendiri berdasar dari nilai budaya Kampoeng Tjibarani dan bertujuan sebagai wisata edukasi. Selain terjadinya konflik kepentingan ini, terdapat faktor lain dari permasalahan SDM, belum adanya pengelola atau kepengurusan yang bertanggung jawab dalam pengurusan kolam konservasi berkelanjutan juga mengakibatkan keamanan dan aktivitas di kolam terganggu, seperti kejadian pencurian bibit ikan endemik.

Kedua, dasar pembuatan kolam konservasi ini tidak begitu dijelaskan oleh DPU Kota Bandung, berdasarkan wawancara dengan kelurahan serta pihak DPU Kota Bandung, penulis tidak mendapatkan data bahwa kolam konservasi merupakan perwujudan untuk pengelolaan DAS seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembuatan kolam ini tidak sesuai dengan standar bagaimana pengelolaan kawasan sempadan sungai pada seharusnya. Bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya terdapat di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), namun belum ada bukti secara tertulis juga RKP DPU Kota Bandung terkait program kolam konservasi.

Ketiga, fungsi dari tiap - tiap kolam yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Pembuatan kolam konservasi dengan tiga tujuan ; penampung mata air, konservasi ikan endemik, dan budidaya aquaponik tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Kenyataannya, berdasarkan hasil observasi, kolam - kolam tersebut berisi genangan air kotor, sebelum pandemi Covid - 19, masyarakat Kampoeng Tjibarani juga menyatakan salah satu kolam hanya berfungsi selama antara dua atau tiga bulan sebagai konservasi ikan Osteochilus vittatus dan dijadikan tempat terapi ikan. Kolam lainnya hanya beralih fungsi setelah pembangunan kelar, kolam pertama yang berfungsi sebagai tempat penampungan mata air dialokasikan menjadi kolam renang untuk anak - anak. Sedangkan kolam keempat untuk budidaya aquaponik urban farming hanya diisi ikan hias yang kini kondisi nya hanya genangan air kotor saja. Inkonsistensi fungsional kolam - kolam ini mengakibatkan pembangunan kolam tidak sesuai dengan standar dan implementasi kebijakan yang ada tentang pemanfaatan dan pengelolaan DAS.

Kualitas dan Standar Kolam Konservasi berdasarkan Regulasi

Berdasarkan dari teknik pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, penelitian ini mengambil beberapa regulasi. Regulasi yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini tidak hanya dilihat dari satu kebijakan seperti pembahasan sebelumnya diatas. Regulasi ini dimaksudkan sebagai acuan dalam evaluasi program kolam konservasi yang telah dibuat oleh DPU Kota Bandung. Regulasi di sini terdiri dari beberapa peraturan yakni; (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAerah Aliran Sungai Citarum; (3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Ketiga kebijakan ini memuat hal - hal apa saja yang harus dimiliki oleh tatanan kawasan sempadan sungai yang dikelola menjadi sebuah wilayah kegiatan.

Kualitas dan standar suatu kegiatan pada umumnya diatur dengan regulasi terkait. Regulasi ini diperuntukkan menjadi acuan pembuatan program yang akan dibangun dan dikelola dapat memiliki esensi berkelanjutan dan sesuai dengan fungsi program tersebut dibuat. Selaku suatu wilayah kegiatan, kawasan sempadan sungai Cikapundung dialihfungsikan dengan dibangun sebuah kolam konservasi. Konservasi yang dimaksudkan untuk tujuan pelestarian ikan endemik Sungai Cikapundung yang terancam punah, selain itu penampungan mata air yang ditujukan sebagai kolam retensi, dan terakhir budidaya aquaponik urban farming.

Berdasarkan dari fungsi dan tujuan pembuatan tiap - tiap kolam konservasi yang akan ditinjau keberhasilannya melalui beberapa regulasi tersebut terdapat beberapa penemuan yang menjadikan kolam konservasi dinyatakan dibuat belum sesuai regulasi dan fungsi yang selayaknya. Pertama, di dalam program ini tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang seharusnya, pengelolaan DAS harus memperhatikan penggunaan lahan DAS, kriteria disini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kondisi lahan yang sedang terjadi dan nanti dampaknya kepada DAS ketika dibangun program. Indikator penilaian kriteria ini antara lain adalah pengevaluasi penggunaan lahan dengan rencana tata ruang indikator. Sedangkan yang terjadi di lapangan, kolam konservasi yang dibuat belum memperhatikan fungsional lahan. Seperti terbentuknya kolam yang tidak diperlukan sehingga hanya menjadi kolam berisi genangan air saja. Lalu, kolam konservasi mata air yang disebut sebagai kolam retensi, pada observasi lapangan kolam tersebut tidak tampak dan berfungsi seperti kolam retensi pada umumnya. Pembangunan kolam - kolam konservasi yang belum memperhatikan kriteria lahan dampak berdampak terjadinya peralihan fungsi dari tujuan pertama program.

Kriteria kedua yang dijadikan acuan untuk evaluasi adalah sosial ekonomi DAS. Hubungan kriteria ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dan hubungan timbal balik antara faktor - faktor sosial ekonomi dengan sumber daya alam (tanah, air, dan vegetasi) baik langsung maupun tidak langsung (Departemen Menteri Kehutanan, 2019). Dalam pembangunannya telah dijelaskan bahwa DPU Kota Bandung melaksanakan program yang berawal dari *ongoing development* komunitas Serlok Bantaran, namun pada pelaksanaannya terdapat konflik kepentingan sehingga komunitas menjadi dua kubu. Kubu pertama bersama DPU Kota Bandung tetap melaksanakan program kolam konservasi tanpa konsep *ongoing development* yang memiliki ciri khas wisata budaya - edukasi sesuai dengan nilai sosial ekonomi Kampoeng Tjibarani. Sehingga hasil dari program pembangunan kolam konservasi yang seharusnya memperhatikan aspek sosial ekonomi belum diterapkan oleh pihak DPU Kota Bandung. Indikator penilaian kriteria ini diantaranya dapat dilihat dari kepedulian individu, partisipasi masyarakat. Kepedulian individu di sini ditekankan pada kepedulian masing - masing masyarakat terhadap upaya konservasi dan indikator partisipasi masyarakat dapat dievaluasi melalui keikutsertaan masyarakat baik dalam pembangunan dan pengelolaan nya. Berdasarkan dari acuan indikator ini dan hasil observasi serta wawancara langsung, partisipasi masyarakat disebutkan nihil, DPU Kota Bandung tidak melibatkan masyarakat secara langsung untuk menjadi pengelola berkelanjutan kolam konservasi ini. Sebaliknya, hanya menugaskan satu orang petugas yang bertempat tinggal di Kampoeng Tjibarani untuk melakukan tugas keamanan, kebersihan dan pengelolaan keberlanjutan kolam

- kolam konservasi.

Dari paparan di atas, evaluasi program yang berdasarkan kriteria - kriteria dan cara penilaian tiap indikator, program kolam konservasi dengan keadaannya di lapangan dinyatakan belum memenuhi baik dari sisi pengimplementasian kebijakan yang berlaku, kualitas pengelolaan DAS yang benar, serta fungsional dari program. Layaknya yang dinyatakan di dalam peraturan pemerintah bahwa konservasi air juga harus selaras dengan program pembangunan wilayah yang telah disahkan dan melestarikan kualitas sumberdaya lahan tersebut. Selain fungsional lahan, kebijakan pemerintah menekankan harus adanya peran serta memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan (Departemen Menteri Kehutanan, 2019).

Pemberdayaan melalui Mini Ecopark

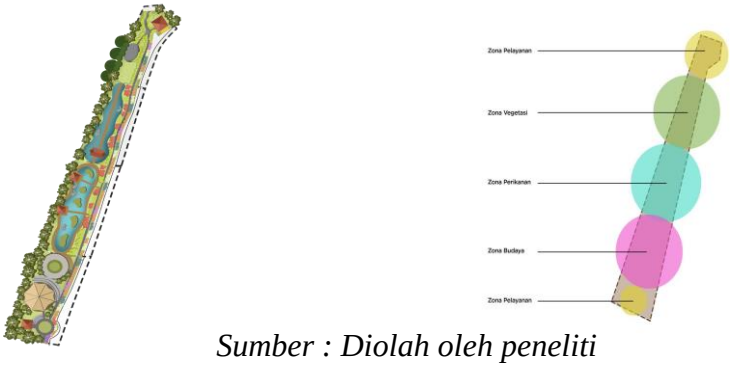
Berdasarkan evaluasi program kolam konservasi menurut regulasi yang ada, penulis menawarkan konsep pemeliharaan dan pelestarian yang di dalam nya terkandung nilai ekologis, sosial budaya, dan yang terpenting berkelanjutan sesuai dengan pemanfaatan fungsi lahan. Konsep pemeliharaan atau konservasi yang akan dilakukan berupaya untuk menghidupkan kembali lahan DAS yang telah dibangun sebagai kolam konservasi dengan cara pembangunan ulang di lahan yang sama berbentuk mini Ecopark. Ecopark yang dimaksud berupaya untuk melestarikan lahan agar penggunaan lebih efisien dan mengatur arah pengembangan lahan tersebut. Untuk pengkonsepan ecopark telah dilakukan oleh pemerintah dengan pembangunan Tebet Ecopark yang berlokasi di Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan. Tebet Ecopark merupakan bukti nyata dari penerapan yang sesuai standar dan kualitas pengelolaan lahan, berupa flooded land menjadi resilient park. Tebet Ecopark yang memiliki kandungan nilai ekologis dan pelestarian lingkungan melalui revitalisasi.

Tebet Ecopark dapat dijadikan acuan pengkonsepan untuk pembangunan mini ecopark di DAS Cikapundung. Selain memanfaatkan fungsional lahan dengan maksimal, pembangunan ini sesuai dengan nilai ekologis, sosial budaya masyarakat Kampoeng Tjibarani. Konsep pelestarian yang digunakan adalah revitalisasi, yakni pemugaran untuk mendapatkan nilai tambahan karena penurunan produktivitas suatu lahan (Purnaya, IGK ; Semara, IMT ; KR, Tunjungsari ; IN, 2019). Mini ecopark ini memiliki visi untuk mewujudkan ruang publik yang relevan sesuai fungsi lahannya, ruang publik yang dimaksud berdasarkan ketentuan regulasi untuk pembangunan lahan di kawasan DAS, yakni harus dapat dinikmati dan berfungsi untuk masyarakat setempat. Perancangan konsep ecopark di kawasan lahan kolam konservasi dilakukan dengan sistem *rebuild*, yang nantinya kolam - kolam akan dilakukan

perataan kembali untuk pembangunan sesuai dengan rancangan zonasi. Zonasi ini dibuat untuk melihat lahan - lahan dan agar pembangunan dilakukan secara fungsional nantinya.

Zonasi dan pemetaan yang dilakukan berdasarkan acuan seperti Tebet Ecopark, yang mana Tebet Ecopark memiliki sekitar 8 zona. Zona ini memiliki fungsi - fungsi nya masing - masing dengan unsur - unsur ekologis, vegetasi, dan budaya. Sama halnya dengan pengonsepan mini ecopark Kampoeng Tjibarani, dikonsepkan memiliki sekitar 3 zonasi. Zona - zona ini dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dipadukan dengan fungsional lahan. Zona pertama yakni zona pelayanan, lalu zona kedua perikanan dan vegetasi, terakhir zona budaya dan pelayanan. Secara garis besar pemetaan dan zonasi lokasi lahan kawasan sempadan sungai Cikapundung yang terletak di Kampoeng Tjibarani terlihat seperti di Gambar. 4

Gambar 4. Konsep Zonasi



Sumber : Diolah oleh peneliti

Pada zona pertama yakni zona pelayanan, di zona pelayanan akan dibangun saung awi sebagai tempat layanan informasi dan *entrance gate* berbentuk gerbang awi. Untuk di sisi kiri kanan jalan akan dibangun lorong awi dan juga *flower garden* berbentuk seperti lorong. Di layout zona Gambar. 5 terpapar juga ada toilet dan *seating area* untuk pengunjung.

Gambar 5. Zona Pelayanan



Sumber : Diolah oleh peneliti

Selanjutnya, di zona kedua dan ketiga terdapat zona vegetas dan zona perikanan. Zona vegetasi di sini dilengkapi dengan tanaman endemik yang sering ditemukan di DAS Sungai Cikapundung, dikonsepkan dengan *flower garden* yang nanti akan berisikan tanaman endemik serta flower garden, terdapat pula saung induksi sebagai tempat untuk beristirahat pengunjung atau *seating area*. Di zona perikanan dirancang untuk memiliki beberapa blok, blok pertama terdapat kolam konservasi ikan endemik Sungai Cikapundung, ikan yang dimaksud dapat berupa jenis ikan endemik Kancra, Beunteur, Genggehek, Paray, Sengal, Lalawak, Sili dan lain sebagainya. Blok selanjutnya akan diisi dengan terapi ikan endemik menggunakan bibit ikan Nilem, yang kelak dapat di restorasi juga ke sungai kembali. Blok terakhir terdapat area pemancingan ikan budidaya sehingga dapat menjadi nilai ekonomi juga bagi masyarakat dan pengelola yang akan mengelola blok itu nantinya. Zona - zona ini dilengkapi dengan saung - saung induksi dan juga *seating area*.

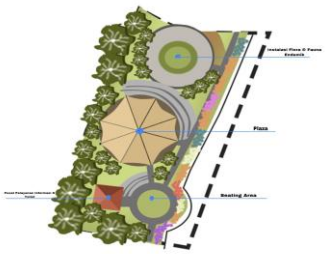
Gambar 6. Zona Perikanan dan Vegetasi



Sumber : Diolah oleh peneliti

Terakhir, zona budaya dan pelayanan. Untuk zona budaya sendiri akan diisi dengan plaza mini sebagai ruang semi terbuka untuk pengunjung yang mana didalamnya terdapat instalasi digital berisi tanaman endemik dan ikan endemik berbentuk digital, instalasi ini dikhususkan untuk flora dan fauna endemik yang telah mengalami kepunahan sebagai bentuk wisata edukasi layaknya *mini museum*. Sama seperti sebelumnya di *entrance gate*, di zona pelayanan ini juga terdapat tempat pelayanan dan informasi serta toilet.

Gambar 7. Budaya dan Pelayanan



Sumber : Diolah oleh peneliti

PENUTUP

Hasil keseluruhan dari penelitian ini menyajikan hasil evaluasi yang dilakukan pada kolam konservasi DAS Sungai Cikapundung, Kampoeng Tjibarani. Penelitian ini menemukan bahwa kolam - kolam yang dibangun belum sesuai dengan konservasi yang akan dilakukan di kolam tersebut. Selain itu data di lapangan menyatakan bahwa produktivitas kolam hanya berlangsung selama dua hingga tiga bulan, hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti pandemi Covid - 19, pengelolaan yang tidak berkelanjutan, fungsional lahan yang tidak memperhatikan standar dan kualitas yang telah ditentukan regulasi pemerintah. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian, diperlukan adanya revitalisasi atau pemugaran kawasan di lahan sempadan sungai tersebut. Melalui mini ecopark dengan zonasi yang memiliki unsur - unsur ekologis, sosial budaya Kampoeng Tjibarani diharapkan dapat menjadi solusi dan terobosan terbaru untuk pemangku kebijakan di program pelestarian dan pengembangaan lahan DAS Sungai Cikapundung kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyana, G. H. (2018). Restorasi Citarum, Dari Sungai Menuju Gelas. *Pemenang Lomba Writing Thon Dikti 2018, Indonesia Untuk Citarum Harum, Kemenristekdikti*. Https://Files.Osf.Io/V1/Resources/8s6r2/Providers/Osfstorage/5b3963f69456bc000fb04c84?Version=1&Displayname=Restorasi+Citarum,+Dari+Sungai+Menuju+Gelas-2018-07-01t23:29:58.762z.Pdf&Action=Download&Direct

Departemen Menteri Kehutanan. (2019). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-Ii/2009*.

Fuady, Z., & Azizah, C. (2008). Tinjauan Daerah Aliran Sungai Sebagai Sistem Ekologi Dan Manajemen Daerah Aliran Sungai. *Lentera*, *6*, 1–10.

Kampoeng Tjibarani. (2022). *Program Kami : Kampoeng Tjibarani*. Https://Kampoengtjibarani.Com/Program-Kami/

Karno, R., & Mubarrak, J. (2018). Analisis Spasial (Ekologi) Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (Das) Di Sungai Batang Lubuh Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Edu Research*, *7*(2), 1–4.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi Dan Kimia Kebijakan* (5th Ed.). Elex Media Komputindo. Https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=814883

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dengan*. *3*(September), 1–47.

Purnaya, Igk ; Semara, Imt ; Kr, Tunjungsari ; In, L. (2019). *Desain Eco Culinary Pada*

Daerah Aliran Sungai.

Sihombing, E. S. (2019). Reposisi Paradigma Terhadap Alam Semesta: Tawaran Refleksi Filosofis Dan Teologis. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, *6*(1), 87. Https://Doi.Org/10.33550/Sd.V6i1.110

Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi*. Raja Grafindo Persada. Https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=139